



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang masalah**

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yaitu bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ini ada di tangan rakyat. Indonesia menganut paham demokrasi dengan sistem multipartai sehingga dapat menyalurkan kepentingan dalam masyarakat yang plural. Melalui sistem multipartai, partai politik baik lama maupun baru saling berkompetisi dalam memperebutkan kursi kekuasaan legislatif melalui sistem pemilu baik pemilu legislatif untuk memilih anggota DPD, DPRD, DPR serta pemilihan untuk presiden dan wakil presiden. Sejak tumbanganya jaman orde baru, partai politik Indonesia mulai mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan semakin meningkat dari tahun ke tahun sampai sekarang.

Undang-undang Nomer 2 tahun 2008 tentang partai politik mendefinisikan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pengertian diatas dapat dikatakan bahwa partai politik memiliki peranan penting dalam setiap paham demokrasi. Oleh sebab itu partai politik biasa juga disebut sebagai pilar utama demokrasi karena mereka ikut memaikan peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat (warga negara).

Huntington dan Przeworski dalam Gonzales-acosta (2009, h.28) mendeskripsikan demokrasi tidak hanya sebagai sistem politik yang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan perwakilan, tetapi juga sebagai sistem politik yang mengatasi masalah tirani dengan memperbolehkan pemilih untuk memilih perwakilan dari partai politik melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Artinya, demokrasi memberikan pemilih berwenang untuk memilih calon pemimpin dan menurunkan mereka dari jabatan jika bekerja tidak memuaskan, namun tidak ada jaminan kebebasan dan kesejahteraan.

Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip dalam Miriam Budiardjo (2008, h.403) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta materiil.

Sigmund Neumann dalam Miriam Budiardjo (2008, h.403) mengemukakan definisi partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Tujuan ini untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan partai. Partai politik merupakan gambaran peran rakyat dalam percaturan politik nasional dan partisipasi politik rakyat. Pemilu secara langsung yang dilaksanakan di Indonesia merupakan negara paling demokrasi paling demokratis ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses modernisasi diri (Budiardjo, 2003, h.159). Secara teoritikal, makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara. Banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan (Subijanto, 2000, h.1)

Fungsi partai politik berdasarkan Undang-undang no 2 tahun 2008 tentang partai politik pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Perbedaan ini terletak pada cara pencapaian tujuan di mana *political public relations* meraih dukungan legitimasi politik dengan membangun hubungan antara partai dan kader politik dengan pemilih (*voters*). Melalui hubungan ini, partai politik tidak hanya mampu mendapatkan dukungan legitimasi politik tetapi juga dapat memelihara kesetiaan dan kepercayaan pemilih (*voters*) (Stromback & Kioussis, 2011, h. 187-189). Secara singkat, *political public relations* juga membangun hubungan jangka panjang

dengan pemerintah, media massa, dan lawan politik untuk mencapai hubungan yang saling mengerti (*mutual understanding*) dan menguntungkan (*mutual beneficial*)

Iklim demokrasi di Indonesia mulai berkembang pesat sejak era reformasi. Partai politik mulai berkembang pesat dan membuka kesempatan bagi orang untuk bergabung dengan partai politik secara bebas dan tanpa paksaan. Praktek politik di Indonesia sendiri telah berkembang sedemikian pesat dengan memanfaatkan ilmu marketing. Hal ini didorong oleh heterogennya masyarakat serta meningkatnya taraf ekonomi dan pendidikan masyarakat sehingga partai politik harus mengaplikasikan berbagai aspek untuk dapat menarik masyarakat. Citra tentu tidak dapat dipisahkan dari individu maupun organisasi. Citra harus dibangun dan dipertahankan karena jika seorang kandidat atau sebuah anggota memiliki citra yang buruk maka akan berimbas buruk juga kepada partai. Memang citra itu abstrak dan tidak bisa diukur secara matematis, tetapi dapat dirasakan dari hasil penilaian yang baik atau buruk yang datang dari masyarakat. Untuk membangun citra partai dan kader politik yang positif, dibutuhkan praktisi *public relations* guna menyusun, mengembangkan dan menjalankan strategi-strategi untuk mencapai kesuksesan partai dan kader politik di pemilu.

Beberapa tahun terakhir ini, partai politik terlihat melakukan aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang terlihat terpisah dari tujuan bisnis, yaitu melakukan kebaikan dan melakukan amal kepada organisasi ataupun

kelompok masyarakat. Permasalahan sosial yang makin tahun makin rumit dalam dekade terakhir menempatkan CSR sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

Studi yang dilakukan oleh Saunders (2006, p.72), menemukan bahwa persentase konsumen yang mau merekomendasikan sebuah brand yang mendukung *cause* yang bagus daripada produk yang tidak mendukung apapun adalah sebesar 52%. Sementara itu, 55% dari konsumen memilih untuk membeli dari sebuah merek yang mendukung *cause* yang bagus bahkan jika mereka bukan yang paling murah. Perusahaan yang membuat CSR sebagai bagian dari bisnis mereka memetik hasil dalam bentuk keberlangsungan perusahaan, mengurangi liabilitas dan biaya asuransi, dan peningkatan citra merek. Hasil riset oleh Roper Search Worldwide dalam Susanto (2007, p.16) menyebutkan sebanyak 75% responden memberikan nilai positif bagi perusahaan yang memberikan kontribusi nyata kepada suatu komunitas masyarakat. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa program *corporate social responsibility* terhadap citra suatu perusahaan atau organisasi menjadi penting untuk diteliti.

ISO 26000 yang merupakan standar internasional yang memberikan panduan dalam menggarisbawahi prinsip dari tanggung jawab sosial menjelaskan bahwa standar ini dapat berguna untuk semua jenis organisasi dalam sektor privat, publik, dan sektor non-profit lainnya, baik besar ataupun kecil, baik di Negara maju atau Negara berkembang. Hal ini yang

menjadi dasar bahwa CSR tidak hanya bisa digunakan dalam sektor korporasi saya, namun sekarang bisa masuk ke ranah partai politik juga (2010, h.vi)

Partai Gerindra merupakan salah satu partai politik yang ikut pemilu 2014. Partai Gerindra didirikan pada 6 Februari 2008. Berdirinya Partai Gerindra terdorong dari rasa terpengilnya para pendiri melihat kondisi bangsa Indonesia yang mayoritas rakyatnya masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik yang tak kunjung mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas rakyat Indonesia dari kemelaratan.

Partai Gerindra yang baru mengikuti 2 kali pemilu ini merupakan salah satu partai yang terbilang cukup baru dalam dunia perpolitikan namun sekarang sudah menjadi salah satu partai besar yang ada di Indonesia. Menurut situs resmi kpu.go.id menjelaskan bahwa partai Gerindra untuk periode 2014 – 2019 mendapat perolehan kursi sebanyak 73 kursi (11,81%) dan menempati posisi ketiga partai terbanyak yang mendapat kursi di dewan DPR-RI setelah PDIP dengan 109 kursi (18,95%) dan Golkar dengan 91 kursi (14,75%). Bahkan banyak partai-partai yang sudah berdiri sejak lama masih mendapat kursi yang lebih sedikit dibandingkan partai yang baru berdiri 9 tahun ini.

Dari data yang didapat dari Metropolitan.kompas.com, pada putaran pemilihan Gubernur 2017 antara Basuki Tjahaya Purnama-Syaiful Djarot dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno putaran pertama

yang masing-masing diusung oleh partai masing-masing salah satunya Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang mendapat dukungan dari Partai Gerindra mendapat 3.240.987 suara atau 47% sedangkan pasangan Ahok-Djarot yaitu 2.350.366 suara atau 57,96 %. Secara resmi pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017 – 2022. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah menerima dan mendukung partai Gerindra menjadi salah satu partai besar di Indonesia.

<b>KANDIDAT</b>	<b>AHOK – DJAROT</b>	<b>ANIES - SANDIAGA</b>
<b>HASIL</b>	2.350.366 Suara	3.240.987 Suara
<b>PERSENTASE</b>	42,04 %	57,96 %

Table 1.1. Hasil perolehan suara Pilgub DKI Jakarta 2017  
Sumber: metropolitan.kompas

Pada pelayanan kesehatan partai Gerindra menyediakan Ambulance Gratis dan mobil jenazah gratis yang diurus oleh Badan Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) sebagai sayap partai. Ambulance mereka tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk memberikan layanan 24 jam kepada masyarakat secara gratis. Program yang dibuat tahun 2011 telah menurunkan ratusan mobil ambulance gratis dan berjalan setiap tahun secara konsisten dan tidak dipengaruhi apakah ada pemilihan umum ataupun tidak. Program CSR partai Gerindra ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat ekonomi lemah sekaligus kewajiban partai politik dalam memberikan pelayanan membantu pemerintah.

Dari penjabaran diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada CSR yang dilakukan partai Gerindra. Program Ambulance gratis dan mobil jenazah gratis adalah salah satu program unggulan partai Gerindra dalam membantu rakyat kecil di seluruh Indonesia. Program yang sudah berjalan lebih dari enam tahun ini sudah mencakup 20 kota di seluruh Indonesia dari sabang sampai marauke.

## **1.2. Rumusan masalah**

- 1.2.1. Bagaimana implementasi strategi CSR Partai Gerindra dalam membangun *brand image* di DKI Jakarta?
- 1.2.2. Faktor apa saja yang menjadi peluang dan tantangan aktifitas CSR partai Gerindra dalam membangun Brand Image?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Tujuan Penelitian
  - 1.3.1.1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi CSR partai Gerindra dalam membangun Brand Image.
  - 1.3.1.2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi peluang dan tantangan aktifitas CSR partai Gerindra dalam membangun Brand Image.

### 1.3.2. Manfaat penelitian

#### 1.3.2.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap bidang ilmu komunikasi, terutama dalam bidang CSR politik. Penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana CSR dapat menjadi *tools* yang efektif untuk kegiatan PR dalam meningkatkan *brand image*.

#### 1.3.2.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menjadi bahan tinjauan dalam melihat kreatifitas dan penggunaan CSR dalam aktifitas *Public Relations* dalam partai politik. Penelitian ini dapat menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana CSR dapat digunakan oleh partai politik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

U  
M  
M  
N